

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografis beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92 hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Pada periode 2003-2007, laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dapat dikendalikan secara signifikan, yaitu dari sebesar 2,25 persen pada Tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada Tahun 2007.

Pada tahun 2007, penduduk laki-laki sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa. Sedangkan menurut kelompok umur, pada tahun 2003 hingga 2007 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk Jawa Barat didominasi dengan penduduk berkerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Perkembangan perekonomian daerah selama kurun waktu tahun 2003 - 2007 diwarnai dengan terjadinya gejolak ekonomi pada tahun 2005, seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Kondisi tersebut cenderung stabil sampai dengan tahun 2007. Stabilitas ekonomi makro dan kondisi keuangan nasional yang tetap terjaga hingga akhir tahun 2007, menunjukkan fundamental ekonomi nasional yang semakin membaik dalam menghadapi perubahan eksternal dan internal. Stabilitas indikator ekonomi makro nasional tersebut berimplikasi positif

bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Secara umum, perekonomian Jawa Barat tahun 2007 mengalami pertumbuhan 6,41%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,2%. Inflasi tahun 2007 tercatat sebesar 5,10% lebih rendah dari tahun 2006 sebesar 6,15%. Penurunan laju inflasi ini dikarenakan terkendalnya harga kebutuhan bahan makanan serta pasokan bahan makanan terutama beras cukup tersedia.

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 akan mencapai kisaran 6 - 6,5 persen dibawah prediksi pemerintah sebesar 6,8 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global dan tingginya harga minyak di pasar internasional, menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2008 tidak setinggi target pemerintah. Penurunan pertumbuhan ekonomi global itu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2008. Untuk Provinsi Jawa Barat, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan antara 6 – 6,5 % persen. Pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan – hotel - restoran (PHR) dan pertanian.

2.1. Evaluasi Pembangunan 2003 – 2007

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah mencapai kemajuan. Hasil evaluasi selama periode 2003-2007 dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Jawa Barat. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan.

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat yang masih tinggi dipicu oleh tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk Jawa Barat.

Pembangunan kualitas hidup penduduk Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2007, IPM Jawa Barat mencapai angka 70,69, meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,31. Dalam rentang 2002–2007, IPM Jawa Barat meningkat sebesar 4,85 dari angka 65,84 pada Tahun 2002 menjadi 70,69 pada Tahun 2007.

Dalam rentang waktu yang sama, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 2,14 poin, dari 78,07 pada Tahun 2002 menjadi 80,21 pada Tahun 2007; Indeks Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 5,14 poin, dari 65,83 pada Tahun 2002 menjadi 70,97 pada Tahun 2007; dan Indeks Daya Beli sebesar 7,29 poin, dari 53,61 pada Tahun 2002 menjadi 60,90 pada Tahun 2007. Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). AMH pada tahun 2007 adalah sebesar 95,32% (angka sangat sementara) meningkat dibandingkan tahun 2002 sebesar 93,10%, atau menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,22% dibanding Tahun 2002. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sampai dengan tahun 2002 masih sebesar 7,20 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Tahun 2007 RLS mencapai 7,50 tahun (angka sangat sementara), atau naik sebesar 0,3 tahun dibanding tahun 2002. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan dari 64,50 tahun pada Tahun 2002 menjadi 67,58 tahun pada tahun 2007, atau naik sebesar 3,08 tahun dibanding tahun 2002, sedangkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) mengalami kenaikan sebesar Rp 31.526,00, dari Rp 592.000,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 623.526,00 pada tahun 2007.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk kota-kota dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal. Untuk aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pencapaian yang cukup penting ditunjukkan oleh telah terbentuknya lembaga tri partit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring

dengan hal tersebut upaya mengedepankan sekolah kejuruan juga telah dimulai dengan mengubah proporsi jumlah sekolah dan siswa antara SMA dan SMK, yang semula 60:40 menjadi 40:60, dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian, pencapaian indikator kesehatan di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2006 angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat sebesar 40,26/1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB nasional sebesar 38/1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2003 sebesar 321/100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKI nasional sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya kasus penderita gizi buruk balita, yaitu sebanyak 38.760 dan gizi kurang sebanyak 380.673 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang. Di samping itu masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung dari 60 suspect tercatat 6 orang penderita meninggal dunia pada bulan Maret 2007 dan kasus AIDS sebesar 1.578 penderita dan HIV positif sebesar 1.543 penderita (jumlah kumulatif tahun 1998 – Desember 2007).

Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, diantaranya jumlah puskesmas yang pada tahun 2007 berjumlah 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebesar 1.358 puskesmas, tenaga bidan desa/kelurahan berjumlah 7.167 orang dari kebutuhan 5.873 orang. Namun demikian berdasarkan standar pendidikan bidan yang dapat melayani pelayanan kesehatan minimal Diploma III (D3) dan saat ini baru berjumlah 2.215 orang, sedangkan bidan lainnya berjumlah 4.952 orang baru memiliki tingkat pendidikan Diploma I (D1).

Dalam rangka penyelamatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir melalui pengembangan Puskemas mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED) masing-masing 4 Puskesmas di 16 Kabupaten (65 Puskesmas mampu PONED) dan kini sudah berkembang menjadi 92 Puskesmas mampu PONED.

Berdasarkan kondisi di atas untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Jawa Barat. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (%), persentase perempuan pekerja profesional (%), perempuan dalam angkatan kerja (%) dan upah pekerja non pertanian (Rp.000). sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 54,4 dan Indeks Pembangunan Gender mencapai 60,8 walaupun kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu IPG sebesar 59,8 dan IDG sebesar 53,0 namun bila dibandingkan dengan angka nasional masih dibawah yaitu IPG sebesar 70,1 dan IGD sebesar 65,3. Melihat kondisi ini tentunya upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda di Jawa Barat (usia 15-34 tahun) di Jawa Barat sebanyak 14.848.357 jiwa atau 34,16% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh

Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun demikian, upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial.

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Jawa Barat pada tahun 2007 jumlah PMKS mencapai 3.218.872 PMKS. Dari jumlah PMKS tersebut, 58,1% didominasi oleh masalah fakir miskin, sementara masalah anak terlantar dan lanjut usia terlantar masing-masing sebesar 10,3% dan 7,3%. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya upaya untuk meningkatkan penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya.

Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun dalam proses mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat, masih terdapat ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat.

2.1.2 Ekonomi

Kondisi perekonomian makro Jawa Barat mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2003-2007, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,39% pada tahun 2003 menjadi 6,41% pada tahun 2007. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2007 tercatat sebesar 5,10%, turun dari tahun 2003 sebesar 5,69%.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

URAIAN	TAHUN				
	2003	2004	2005	2006	2007
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,39	4,77	5,62	6,01 ^{*)}	6,41 ^{**)}
Inflasi (%)	5,69	7,56	18,51	6,15	5,10

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara.

^{**)} hasil estimasi triwulanan

Peningkatan LPE yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Jawa Barat, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada Tahun 2007 masih didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84% dan sektor Pertanian sebesar 13,01%.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat
Tahun 2003-2007

URAIAN	TAHUN				
	2003	2004	2005	2006	2007
PDRB adh berlaku (juta Rp)	243.793.194	304.458.450,69	389.268.649,47	473.556.757,60	542.272.108,70 ^{*)}
Kontribusi sektor industri manufaktur (%)	43,60	41,88	44,46	45,24	41,21 ^{**)}
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)	18,45	18,91	19,08	19,40	22,31 ^{**)}
Kontribusi sektor pertanian (%)	13,66	13,49	11,93	11,12	12,45 ^{**)}

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara estimasi triwulan III 2007.

^{**)} angka sangat sementara estimasi triwulan IV 2007.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada Tahun 2007 tercatat sebesar Rp 87,137 trilyun (atas dasar harga berlaku), jika dibandingkan dengan Tahun 2003 yaitu sebesar Rp 42,873 trilyun, terjadi kenaikan sebesar 50,80%.

Tabel 2.3
Pembentukan Modal Tetap Bruto Jawa Barat
Tahun 2003-2007

URAIAN	TAHUN				
	2003	2004	2005	2006	2007
Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) a.d.h.Berlaku (juta Rp.)	42.873.463.13	49.749.372,82	63.646.174,39	75.641.574,78 ^{*)}	87.137.142,96 ^{**)}

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara.

^{**)} angka sangat sementara estimasi triwulan III 2007

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Jawa Barat melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode Tahun 2003–2007, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa iklim investasi di Jawa Barat cukup

memberikan peluang bagi para pemodal untuk menanamkan investasinya di Jawa Barat. Namun investasi yang cukup besar di Jawa Barat tersebut, belum sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumber daya manusia daerah.

Tabel 2.4
Realisasi Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Barat
Tahun 2003-2007

URAIAN	TAHUN				
	2003	2004	2005	2006	2007
Realisasi PMA dan PMDN :					
Jumlah investasi (trilyun Rp)	12,99	14,146	18,371	23,741	20,846
Jumlah proyek (buah)	225	221	350	285	262
Jumlah tenaga kerja (orang)	52.933	58.281	97.382	76.161	61.041

Sumber : BPPMD Provinsi Jawa Barat, 2003-2007

Pada periode 2003 - 2007, rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN mencapai 19,13% pertahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2006 sebesar Rp. 23,741 trilyun, jika dibanding dengan Tahun 2005 sebesar Rp. 18,371 trilyun, pada periode tersebut (2005-2006) merupakan pencapaian pertumbuhan investasi terbesar, yaitu sebesar Rp. 5,37 trilyun atau 29,23%. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan, dari Rp. 12,996 trilyun pada Tahun 2003, menjadi Rp. 18,371 trilyun Tahun 2005, dan pada Tahun 2007 sebesar Rp 20,914 trilyun. Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi yang merupakan kontribusi dari peningkatan investasi PMA maupun PMDN sebagai dampak membaiknya iklim investasi.

Iklim investasi di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Sektor industri Jawa Barat merupakan kontributor utama ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi sebesar 44,68%, hal ini didukung oleh banyaknya kawasan industri. Namun demikian, daya saing industri tersebut masih rendah, hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta tingginya pencemaran limbah industri.

Sektor perdagangan di Jawa Barat pengembangannya difokuskan pada sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan peningkatan akses pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, secara nasional Jawa Barat menduduki peringkat ke tiga setelah DKI Jakarta dan Bali. Untuk pengembangan sektor pariwisata, kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung.

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan). Jawa Barat sebagai produsen terbesar pada 40 (empat puluh) komoditas agribisnis di Indonesia, khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 29.65 persen dari jumlah penduduk bekerja, meskipun prosentasi penyerapannya cenderung menurun. Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (*linkages*)

belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Jawa Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan :

1. Belum sinerginya pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang) antar lembaga dan daerah secara regional dan nasional;
2. Belum meratanya informasi hasil litbang dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. Belum dimanfaatkannya hasil litbang oleh para pihak terkait;

4. Masih kurangnya pemahaman terhadap manfaat sistem informasi dan telematika (Sitel) pada lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5. Masih belum optimalnya penggunaan sarana sitel sebagai pendukung komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan;
6. Kurang adanya kesamaan persepsi, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap pentingnya arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban serta fungsi khasanah arsip;
7. Belum optimalnya dukungan pengelolaan arsip baik dari aspek SDM, sarana prasarana serta teknologi;
8. Belum optimalnya dukungan terhadap pemberdayaan dan pembinaan perpustakaan baik aspek SDM, khususnya jabatan fungsional pustakawan, aspek kelembagaan, aspek sarana prasarana dan teknologi.

2.1.4 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Aspek infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada kurun waktu tahun 2003 - 2007, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah meningkat dari 85,17% menjadi 87,31%. Dengan tingkat kemantapan sebesar 87,31% tersebut, 64,36% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Jawa Barat dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Jawa Barat.

Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka,

pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Jawa Barat.

Pada transportasi udara, keberadaan bandar udara di Jawa Barat masih belum memadai untuk menampung *demand* yang ada. Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat saat ini dan beberapa bandara perintis lainnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai persiapan pembangunan Bandara internasional Jawa Barat di Majalengka, persiapan pengembangan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung, serta memfungsikan keberadaan Bandara Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon dan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis.

Pada transportasi laut, keberadaan pelabuhan laut di Jawa Barat masih belum memadai untuk menampung *demand* yang ada. Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pelabuhan terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat saat ini hanya difungsikan sebagai pelabuhan niaga saja akibat kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas yang kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Selain itu beberapa pelabuhan laut lain yang ada di Jawa Barat hanya berfungsi sebagai pelabuhan transit dan pelabuhan ikan saja karena kapasitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya persiapan pembangunan Pelabuhan Utama Cilamaya di Kabupaten Karawang, persiapan pengembangan Pelabuhan laut Cirebon, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pada pelabuhan-pelabuhan pengumpan yang ada di Jawa Barat.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Jawa Barat yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain

akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai, walaupun dari tahun 2003 - 2007 jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan telah berkurang dari sekitar 74% menjadi 46%. Demikian pula halnya dengan intensitas tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih belum optimal, walaupun dalam kurun waktu tersebut telah meningkat dari 182% menjadi 190%.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sampai pertengahan tahun 2008, telah terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dari 57,73% pada tahun 2006 menjadi 62% pada pertengahan tahun 2008, yang artinya dari 11.011.044 rumah tangga baru sekitar 6.826.847 rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN dan non PLN. Sedangkan untuk listrik perdesaan, cakupan desa yang sudah mendapatkan tenaga listrik pada pertengahan tahun 2008 hampir mencapai 100%, dimana hanya tinggal 6 desa yang belum memiliki infrastruktur listrik yaitu sebanyak 2 desa di Kabupaten Garut dan 4 desa di Kabupaten Cianjur. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan untuk mewujudkan Jabar Caang pada tahun 2010, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (*selular*). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2007 masih belum memadai. Pada tahun 2007 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/ledeng/pompa sebesar 45,32% (Suseda, 2007). Rendahnya cakupan pelayanan air minum disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran air (rata-rata 38%), terbatasnya sumber air baku khususnya di wilayah perkotaan, tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada *cost recovery*, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah. Selama periode 2003-2007, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan pada masyarakat miskin di wilayah Pantura dan perdesaan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Strategi penyediaan air minum berbasis masyarakat ini dirasakan telah cukup mampu mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun.

Untuk aspek persampahan, tingkat pelayanan persampahan di Jawa Barat secara umum masih sangat rendah. Cakupan pelayanan persampahan hingga akhir tahun 2007 sebesar 53% dan sekitar 90% pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara *open dumping*. Selain itu kondisi sarana angkutan persampahan masih belum memadai. Untuk wilayah Metropolitan Bandung dan Kabupaten/kota Bogor-Kota Depok, pengelolaan sampah direncanakan akan dilakukan secara regional melalui Tempat Pemrosesan Akhir Regional Leuwigajah, Legoknangka, dan Nambo serta akan dikelola oleh Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB). Namun demikian, hingga akhir tahun 2007, TPA Leuwigajah belum dapat berfungsi karena masih menghadapi permasalahan sosial dan teknis operasional pasca bencana longsor, sedangkan TPA Legoknangka baru sampai tahap kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, permasalahan TPA sampah di Metropolitan Bandung masih mengandalkan Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti sampai dengan tahun 2010. Sedangkan untuk TPA Nambo hingga akhir tahun 2007 baru terbentuk Unit Pelaksana Operasional TPA Nambo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota Bogor-Kota Depok untuk sementara sampai dengan 2010 masih dilakukan oleh tempat pembuangan akhir di masing-masing kabupaten/kota. Selama kurun waktu 2003-2007, telah dilakukan upaya untuk pembangunan TPA dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, namun upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan

mengolah sampah menjadi kompos belum mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, kedepan pembangunan TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya perlu pula ditunjang dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah.

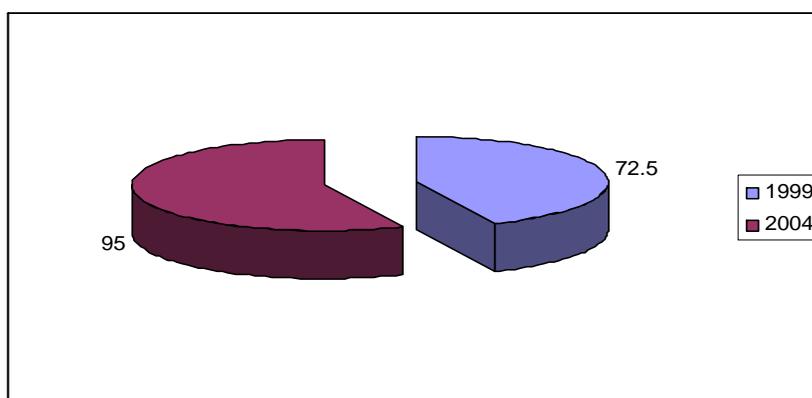
Tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik hingga akhir tahun 2007 masih sangat rendah. Sesuai dengan data Suseda 2007, terdapat 49,01% rumah tangga yang menggunakan tangki/septik tank sebagai tempat pembuangan tinja dan sisanya menggunakan kolam/sawah/kebun/sungai/lubang tanah/lainnya. Kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dari 17 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11 unit yang beroperasi dengan baik dan baru 4 kabupaten/kota yang memiliki sistem penyaluran air limbah domestik perkotaan yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor, dan Cirebon.

Untuk aspek perumahan, *backlog* rumah pada tahun 2007 sebesar 980.000 unit dan diperkirakan akan mencapai 1,164 juta unit pada tahun 2013. Selain itu, terdapat pula 1.035 kawasan kumuh dengan luas sekitar 25.875 ha yang umumnya terdapat di wilayah perkotaan dan permukiman nelayan. Tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbang pembangunan di perkotaan dan perdesaan sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar. Selama kurun waktu 2003 - 2007, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota metropolitan, pengembangan kasiba/lisiba serta penataan kawasan kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

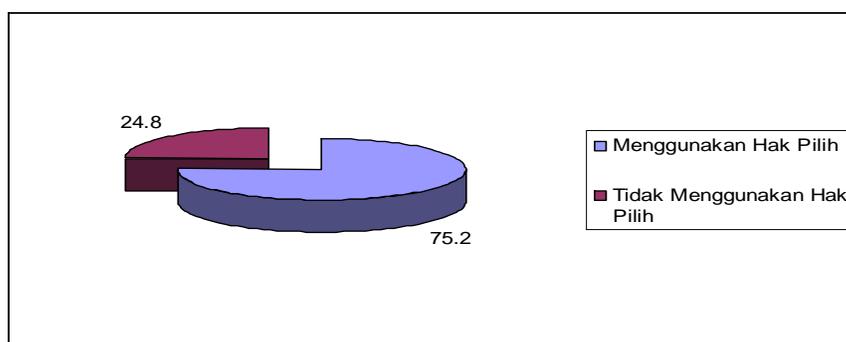
2.1.5 Politik

Dari sisi politik kewilayahan, sebagai daerah yang letaknya berdekatan dengan Jakarta, Jawa Barat diposisikan sebagai penyangga stabilitas politik ibukota. Kondisi politik di Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling banyak sangat menentukan stabilitas politik nasional. Karena itu pembangunan Bidang Politik yang salah satunya ditandai dari keberhasilan pelaksanaan Pemilu Nasional 2004 dan Pemilu Gubernur 2008 menandakan proses demokrasi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dan mulai dapat diterima oleh seluruh *stakeholders*. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Nasional 2004 sebanyak 95% atau naik dari 1999 yang mencapai 72,5%. Namun pada Pemilu Gubernur 2008 mengalami penurunan menjadi 67,31%, dan rata-rata tingkat partisipasi pada Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten dan kota sebanyak 70%. Sepanjang 2005-2008 telah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah (Bupati dan walikota) telah dilaksanakan di 13 kabupaten dan kota. Seluruh pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dengan lancar dan konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Gambar 2.1.
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu DPRD/DPD/DPRD di Jawa Barat Tahun 1999 dan 2004



Gambar 2.2.
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Barat Tahun 2004



Kondisi geografis kawasan berpengaruh terhadap perilaku politik dan preferensi memilih. Pada kawasan yang secara geografis mudah terjangkau, tahap perkembangannya cepat berkembang ke arah kota bahkan metropolitan, seperti Bandung, Bekasi, Bogor, dan Depok perilaku memilih menjadi lebih rasional, heterogen, individualistik-pragmatis, dan lebih terbuka terhadap kompetisi maupun konflik. Berbeda dengan kawasan yang secara geografis sulit dijangkau yang cenderung mewarisi pola agraris/perdesaan, maka perilaku memilih cenderung homogen, mudah dimobilisasi, primordial, dan patrimonialistik.

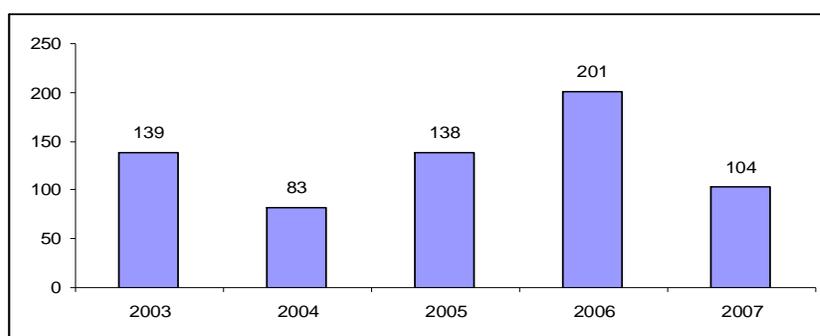
Pada umumnya perbedaan tingkat partisipasi pemilih ini berkaitan dengan efektivitas sosialisasi pemilu kepala daerah, akurasi administrasi pendaftaran pemilih, tingkat popularitas para kandidat serta kesadaran para pemilih untuk memanfaatkan hak-hak utama warganegara dalam memilih kepala daerah yang dipercayainya. Di samping itu peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya masih rendah seperti rekrutmen politik, komunikasi politik, pendidikan dan sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Jumlah partai politik di Jawa Barat yang mengikuti Pemilu Nasional 2004 sebanyak 24 partai dengan jumlah partai yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 partai. Dalam Pemilu Kepala Daerah baik Bupati dan Walikota maupun Gubernur, partai-partai yang berada di DPRD berkoalisi mengusung calonnya. Koalisi yang terjadi bervariasi di tiap daerah dan berbeda pula di tingkat provinsi.

Capaian kinerja pembangunan Bidang Politik lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD, antara lain ditandai jumlah unjuk rasa yang disampaikan kepada lembaga DPRD, dimana pada perkembangan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu rata-rata mencapai 10% sampai dengan 15%;
2. Untuk keberadaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tercatat saat ini sebanyak 190 LSM dan 394 ormas dengan berbagai klasifikasi;
3. Aspirasi yang masuk ke DPRD selama 2003-2007 sebanyak 761 aspirasi, dengan rincian:
 - a. Tahun 2003 sebanyak 139 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah politik, peraturan perUndang-undangan, dan ketenagakerjaan;
 - b. Tahun 2004 sebanyak 83 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah politik; peraturan perUndang-undangan dan ketenagakerjaan;

- c. Tahun 2005 sebanyak 138 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah perekonomian; ketenagakerjaan; hukum/KKN; pemerintahan dan pertanahan ;
 - d. Tahun 2006 sebanyak 201 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah pemerintahan, ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
 - e. Tahun 2007 sebanyak 104 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah KKN/Hukum, pendidikan dan pemerintahan.
4. Perkembangan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3.
Jumlah Aspirasi Yang Masuk ke DPRD Jawa Barat
Tahun 2003 -2007



Dari Gambar 2.3 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi mereka. Hal tersebut menandakan pemahaman dan kesadaran politik sudah cukup baik. Namun dalam proses demokratisasi di Jawa Barat, sistem akses dan kontrol masih belum berkembang. Pola pengaturan akses yang berlaku dalam masyarakat cenderung bersifat terbuka dan komunal, sedangkan pembangunan yang berlangsung telah mematikan mekanisme lokal dalam pengaturan akses secara lebih terbuka atau yang mampu berfungsi dalam menjebatani hubungan atas dan bawah. Gotong royong yang berfungsi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya di berbagai daerah merupakan contoh mekanisme lokal di dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penetapan kebijakan seringkali menafikan keberadaan institusi lokal semacam ini yang turut menyebabkan kemusnahan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain desentralisasi yang merupakan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat belum memperhatikan sifat-sifat dasar yang dimiliki daerah (lokal) dalam artikulasi kepentingan.

Pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam pemerintahan masih mencari pola. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi belum didukung oleh konsep kepemimpinan. Praktik pengelolaan yang baik pada tingkat lokal, sejalan dengan proses desentralisasi, belum memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi berbagai dimensi kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai, maupun dimensi simbolik dari kebudayaan daerah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan masih rendah.

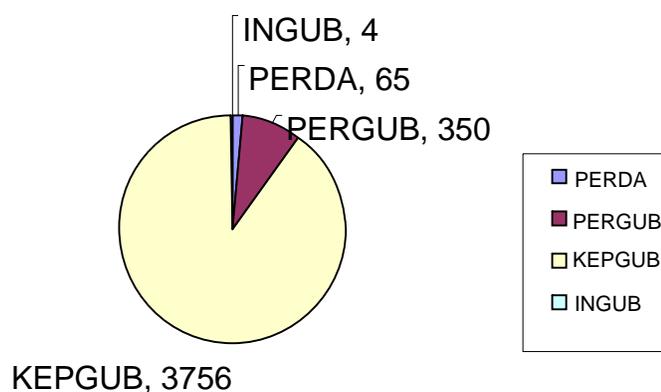
2.1.6 Hukum

Pembangunan Bidang Hukum pada periode 2003 s/d 2007 diarahkan pada Terwujudnya perlindungan Hak Asasi Manusia; Terwujudnya keserasian produk hukum antara pusat, Provinsi serta kabupaten/kota; dan Terwujudnya inisiatif DPRD dalam pengusulan rancangan Perda. Selama periode tersebut capaian kinerja pembangunan Bidang Hukum antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap HAM, yang dapat diukur dari :
 - a. Terbentuknya kelembagaan yang memfasilitasi upaya peningkatan dalam perlindungan HAM, melalui pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM tingkat Provinsi dan di 25 kabupaten/kota.
 - b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama dalam bidang lingkungan hidup dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain ditandai dengan gerakan penghijauan di permukiman yang bersifat swadaya serta kesadaran untuk melaporkan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di rumah tangga melalui aparat penegak hukum.
2. Jumlah produk hukum daerah (Perda, Pergub, Kepgub dsb) yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2003 s/d 2007 mencapai 4.175 buah, dengan rincian Perda sebanyak 65 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 350 buah, Keputusan Gubernur sebanyak 3.756 buah dan Instruksi Gubernur sebanyak 4 buah.

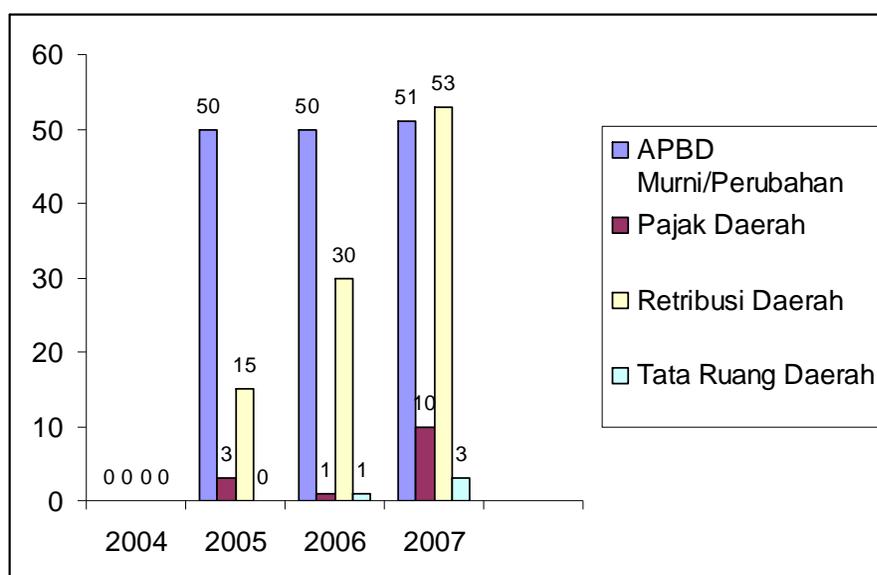
Secara diagram jumlah produk hukum yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.4
 Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat Yang Dihasilkan
 Tahun 2003 s/d 2007



3. Jumlah Produk Hukum daerah yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dan dibatalkan Pemerintah sebanyak 4 buah yakni Perda bidang retribusi daerah.
4. Dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2004 telah dilaksanakan evaluasi terhadap raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 292 buah, dengan perincian sebagaimana terlihat dalam diagram berikut :

Gambar 2.5
 Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
 di Jawa Barat Tahun 2003 s/d 2007



5. Jumlah perda inisiatif DPRD yang tersusun sebanyak 1 buah yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Hukum yakni :

1. Belum ada *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah.
2. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Peraturan perUndang-undangan tidak konsisten, sehingga terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya.
4. Lemahnya budaya hukum masyarakat.

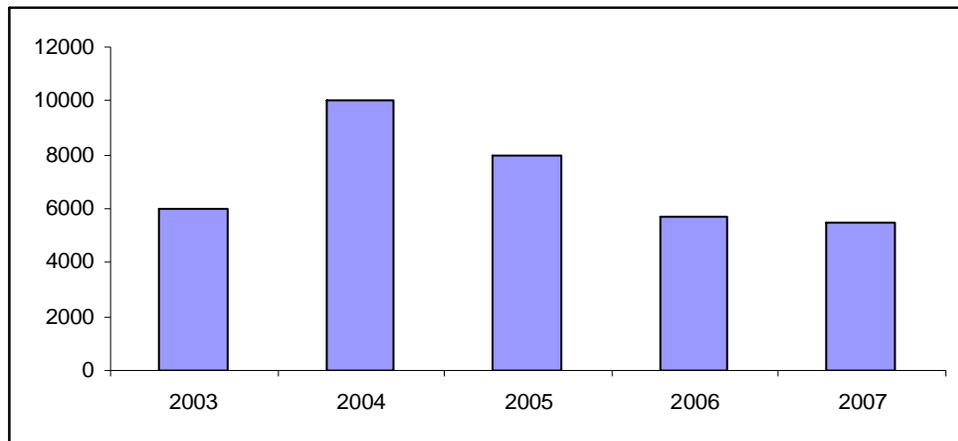
2.1.7 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2003 - 2007 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing; dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2003 - 2007 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah perlindungan masyarakat (Linmas) selama tahun 2003 - 2007 sebanyak 1.568.947 orang;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2007, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Kondisi-kondisi di atas dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.

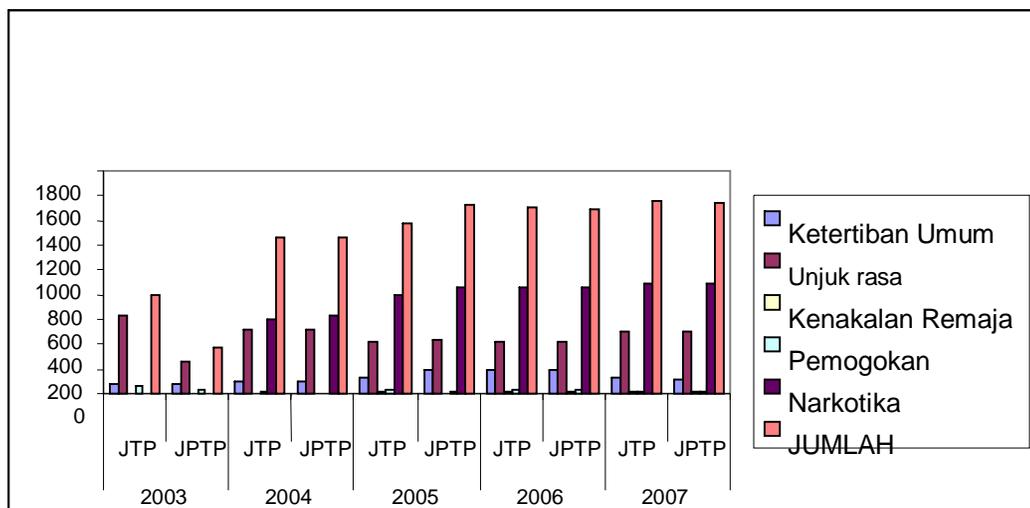
Gambar 2.6
Jumlah Pelanggaran Perda di Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami penurunan, terutama sejak tahun 2004 sampai dengan 2007. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda meningkat sejalan dengan cukup efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Selanjutnya berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, klasifikasi gangguannya terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Data Gangguan Trantibum Di Jawa Barat
Tahun 2003 - 2007



Dari gambar tersebut memperlihatkan bahwa gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang paling menonjol sepanjang tahun 2003-2008, muncul dari penyalahgunaan penggunaan narkoba, dengan trend menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba menjadi ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing. Sedangkan untuk tindak kriminalitas, gambarannya terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8.
Data Indeks Kriminalitas Provinsi Jawa Barat

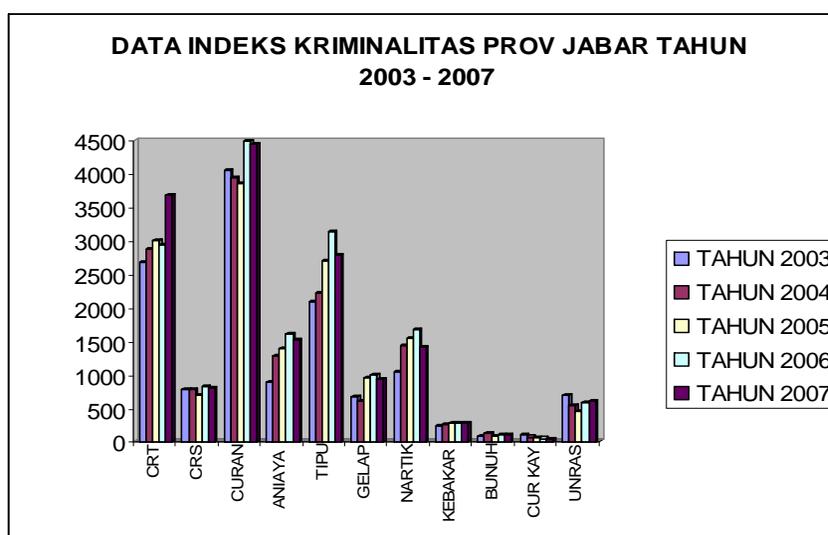


Diagram tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana kriminal yang paling menonjol pada kurun waktu 2003 - 2007 adalah pada jenis pencurian kendaraan bermotor, diikuti oleh pencurian, penipuan, narkoba, penganiayaan serta pemerasan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di provinsi Jawa barat, masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat.

Permasalahan yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat antara lain :

1. Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan

secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

2.1.8 Aparatur

Pada periode 2003-2008 struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan keempat Peraturan Daerah tersebut jumlah SKPD terdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 13 Biro, 20 Dinas, dan 18 Badan, dan 3 Kantor serta 102 UPTD/UPPD. Jumlah unit kerja tersebut diimbangi dengan jumlah aparatur yang cukup banyak. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga bulan April 2008, jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai

14.890 orang, dengan komposisi dari segi kepangkatan dan golongan, meliputi golongan I sebanyak 536 atau sebesar 3,60%, golongan II sebanyak 4.202 orang atau sebesar 28,22%, golongan III sebanyak 8.429 atau sebesar 56,61% dan golongan IV sebanyak 1.723 orang atau sebesar 11,57%.

Peningkatan profesionalisme aparatur terus dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal, jabatan serta pendidikan teknis substantif. Demikian pula dari aspek pembiayaannya, tidak selalu mengandalkan pada kemampuan APBD, melainkan pula telah berkerja sama dengan lembaga lainnya, seperti dengan lembaga INTAN Malaysia, Perancis dan negara-negara lainnya. Peningkatan kompetensi pendidikan formal PNS dapat dilihat upaya pada jenjang pendidikan S-1 melalui jalur ijin belajar, dengan rasio 16,8:1 dibandingkan dengan jalur tugas belajar. Demikian pula rasio sejenis untuk jenjang S-2 mencapai 1,7:1 dan pada jenjang S-3 mencapai 13:1. Kondisi ini telah memberi kontribusi tersendiri terhadap pengalokasian anggaran yang lebih efisien, dengan mengurangi beban belanja aparatur daerah. Walaupun demikian, pengendalian keseimbangan antara kebutuhan kualifikasi kompetensi aparatur daerah dengan minat mengikuti pendidikan formal melalui jalur ijin belajar, terus dilakukan secara cermat. Demikian pula, penajaman kompetensi aparatur ditempuh pula melalui mekanisme mutasi jabatan, melalui mekanisme *asesment* pegawai, psikotest serta *fit and proper test*. Demikian pula telah dilakukan penerapan sistem rekrutmen terbuka dalam pengisian jabatan eselon II, melalui *out sourcing* dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik dari lingkungan pemerintah kabupaten/kota, instansi pusat, juga dari lingkungan perguruan tinggi.

Upaya lainnya yang didorong dalam meningkatkan profesionalisme aparatur serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditempuh melalui perbaikan kesejahteraan pegawai, antara lain melalui pelayanan poliklinik kesehatan, *medical check up* secara rutin setiap 6 bulan, bantuan biaya perawatan, peningkatan pelayanan Bapertarum, bantuan ongkos haji bagi pegawai berprestasi, pemberian penghargaan, hingga pemberian uang duka untuk pegawai yang meninggal dunia.

Peningkatan kinerja aparatur difokuskan pada perbaikan dalam pola pelayanan publik. Salah satu langkah efektif untuk perbaikan pelayanan publik terutama dalam administrasi pemerintahan serta menghindari adanya pungutan ganda yang berakibat pada *high cost economy* dilakukan melalui pembentukan Pusat Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang terpusat di Badan

Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. PPTSP di tingkat provinsi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Di samping itu melalui pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terbentuk PPTSP di 16 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Kota Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Serta telah dibangun juga 1 (satu) PPTSP di tingkat Provinsi.

Terobosan lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan 17 instansi lainnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Ke-17 instansi tersebut adalah DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Perwakilan BPKP, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, KADIN, GAPENSI, 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Bandung *Institute of Governance Studies*. Demikian pula, guna memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-government procurement*) yang telah beroperasi sejak 1 Juli 2008.

Kepercayaan Pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi perintisan *e-government procurement* tidak terlepas dari *performance* yang cukup baik dari sektor telematika, yang tercermin dengan diterimanya penghargaan dari Majalah Warta Ekonomi sebagai Juara II penerapan *e-government* pada instansi Pemerintah Daerah tahun 2003 dan 2007 serta penghargaan Inisiatif dan Kreatif *e-government* dari Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006. Berdasarkan hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama *stakeholders* telematika telah bertekad mewujudkan *Jabar Cyber Province*, yang akan dibangun secara bertahap sampai tahun 2012.

Selain itu, dalam kerangka pemberdayaan potensi daerah, telah dilaksanakan pula revitalisasi program-program kerjasama pemerintahan, baik antar susunan pemerintahan, pihak ketiga maupun *stakeholders* lainnya. Dalam rangka itu telah dilakukan kerjasama antar daerah sebanyak 43 buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah dan kerjasama dengan pihak luar negeri sebanyak 24 buah, yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan 6 (enam)

core bussinesses (bidang pertanian, kelautan, kepariwisataan, manufaktur, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia), serta penyeimbangan pembangunan antar kawasan, antara lain di kawasan utara dan selatan Jawa Barat.

Di samping berbagai capaian kinerja yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan bidang aparatur, kinerja pemerintahan daerah masih belum optimal seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 189 kota/kabupaten pada tahun 2006, ada 39 perijinan satu pintu yang sudah baik. Dari jumlah 39 tersebut, tidak satu pun dari Jawa Barat yang masuk kriteria baik. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal antara lain struktur organisasi yang gemuk dan rumusan tugas pokok dan fungsi yang kurang terinci, budaya birokrasi yang belum berbasis kinerja dan penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi, sehingga profesionalisme aparatur sulit ditingkatkan. Permasalahan lain dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain:

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional;
2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
3. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi;
4. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;
5. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

2.1.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Bidang pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus selama periode 2003-2008. Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa yaitu Terselenggaranya tugas

pembantuan dari Provinsi ke Desa; Pemanfaatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Pemanfaatan Program Raksa Desa. Capaian Kinerja dalam pelaksanaan bidang tersebut selama kurun waktu 2003-2007, antara lain :

1. Terselenggaranya tugas pembantuan dari provinsi ke desa yang meliputi Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Perikanan, dan Bidang Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, antara lain dalam wujud :
 - a. Pemberian bantuan operasional kinerja aparatur pemerintah desa dan kelurahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Jawa Barat Tahun 2003 – 2007

Tahun	Jumlah Desa/Kel	Total Besar Bantuan (dalam rupiah)
2003	5.773	28.885.000.000,00
2004	5.799	28.995.000.000,00
2005	5.808	29.040.000.000,00
2006	5.821	29.105.000.000,00
2006 Tambahan	5.827	14.567.500.000,00
2007	5.841	43.807.500.000,00
TOTAL BANTUAN SELAMA 5 TAHUN		174.380.000.000,00

- b. Pemberian bantuan rehabilitasi kantor desa dan kelurahan dan sarana olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

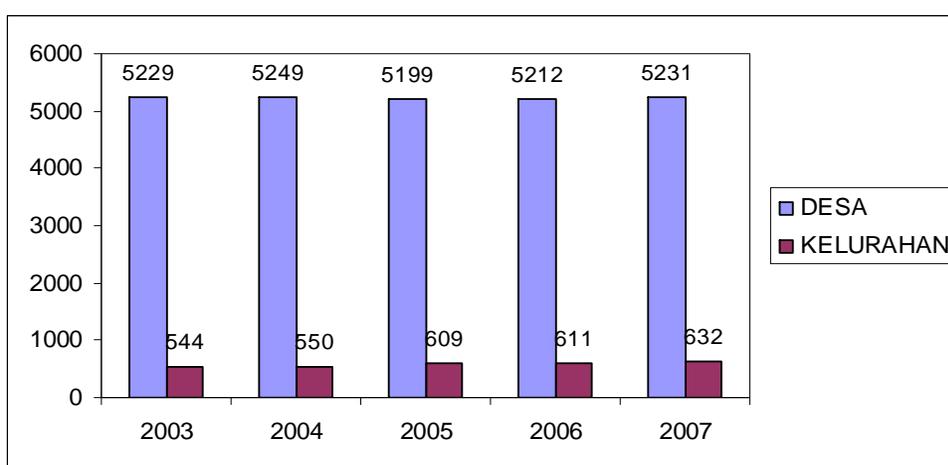
Tabel 2.2

Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kelurahan serta Sarana Olahraga di Jawa Barat Tahun 2003 – 2007

Tahun	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Besar Bantuan (dalam rupiah)
2005	200	5.000.000.000,00
2006	178	5.000.000.000,00
2007	245	6.125.000.000,00
JUMLAH BANTUAN SELAMA 3 TAHUN		16.125.000.000,00

c. Pemberian fasilitasi dalam pemekaran desa dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, dimana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah terjadi pemekaran sebanyak 70 desa, dengan perincian : pada 2004 terjadi pemekaran jumlah desa sebanyak 23 desa, tahun 2005 sebanyak 10 desa, tahun 2006 sebanyak 12 desa, tahun 2007 sebanyak 25 desa. Adapun kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran meliputi Kabupaten Bogor sebanyak 2 desa, Kabupaten Sukabumi sebanyak 17 desa, Kabupaten Cianjur sebanyak 7 desa, Kabupaten Bandung sebanyak 3 desa, Kabupaten Garut sebanyak 14 desa, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3 desa, Kabupaten Ciamis sebanyak 2 desa, Kabupaten Kuningan sebanyak 3 desa, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 desa, Kabupaten Sumedang sebanyak 8 desa, Kabupaten Indramayu sebanyak 3 desa, Kabupaten Subang sebanyak 1 desa dan Kota Banjar sebanyak 2 desa, sedangkan pemekaran kelurahan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 terdapat 18 kelurahan dengan rincian di Kabupaten Karawang 2 kelurahan, Kota Bandung 12 kelurahan dan Kota Bekasi 4 kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 70 desa terdapat di Kabupaten Bogor 2, Kabupaten Bandung 1, Kabupaten Garut 5, Kota Tasikmalaya 54 dan Kota Banjar 8.

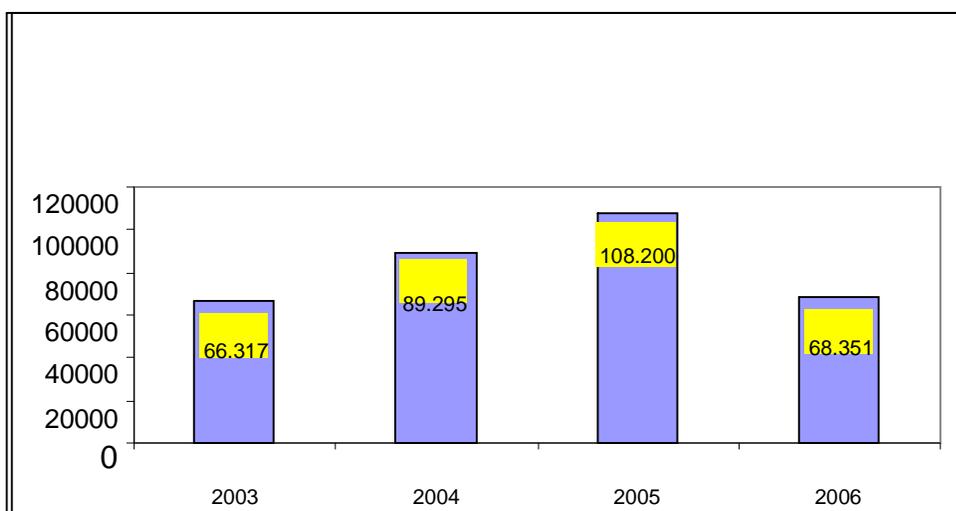
Gambar 2.9
Jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007



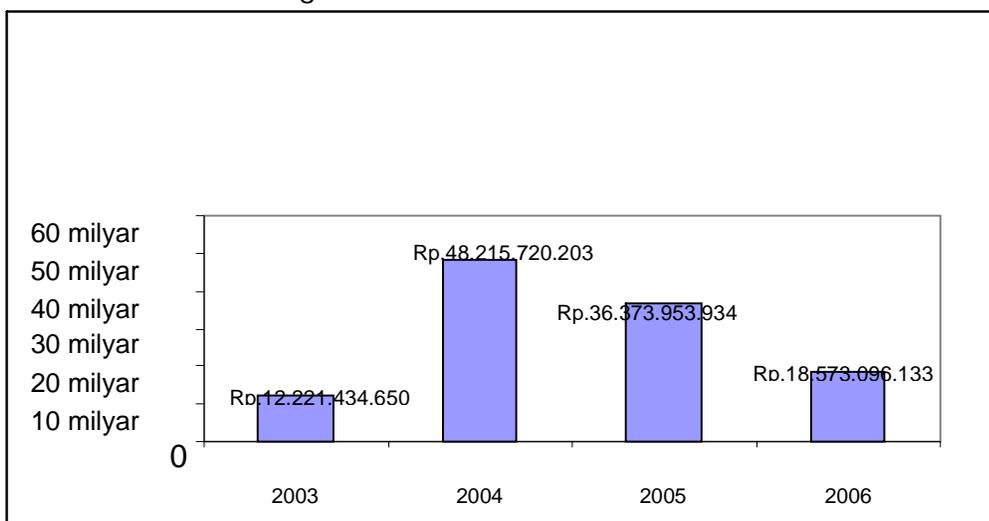
d. Terwujudnya kemanunggalan TNI dan Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 10 kemanunggalan dengan cakupan terlaksananya

- pembangunan pada desa terpencil, terisolir dan tertinggal sebanyak 275 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat;
- e. Terselenggaranya program Raksa Desa yang telah menyerap anggaran pemerintah daerah mencapai Rp.505.583.340.000,00, dengan capaian kinerjanya berupa :
 - f. Infrastruktur yang terbangun di desa sebanyak 10.866 Kegiatan fisik;
 - g. Meningkatnya jumlah KK yang mendapat pinjaman bergulir sebanyak 332.163 KK;
 - h. Terhimpunnya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp. 115.384.204.920,- (77,96%) dari jumlah bantuan infrastruktur sebesar Rp.148.000.000.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 3.700 desa.

Gambar 2.10
Jumlah KK Yang Mendapat Pinjaman Bergulir dari Program Raksa Desa Tahun 2003-2



Gambar 2.11
Jumlah Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pada Program Raksa Desa Tahun 2003-2007



Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif adalah: (a) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan (b) berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumberdaya modal usaha; terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah : (1) ketimpangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan masih rendah disebabkan : (a) kurangnya representasi orang miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi orang miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: aparat pemerintah yang kurang memberi ruang partisipasi; elit politik yang tidak responsif; dan tata pemerintahan yang otokratis.

2.1.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tata ruang Provinsi Jawa Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Sementara kondisi pola ruang diuraikan dalam kondisi kawasan budidaya sawah dan kawasan lindung.

Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah nasional, di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKN tersebut meliputi : Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon. Sedangkan PKW meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo, Pelabuhanratu, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Keterkaitan antar PKN, antar PKW, dan antara PKN-PKW diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wilayah.

Implementasi pengembangan PKN yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2010 memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal, hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana prasarana, namun PKN Bodebek memiliki keberadaan prasarana dan sarana yang lebih optimal dibandingkan PKN Metropolitan Bandung dan PKN Cirebon. Kaitan antara PKN Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Bandung memiliki keterkaitan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur.

Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi baik PKN dan PKW masih rendah.

Di antara kawasan andalan yang ditetapkan (Bodebek dan Bopunjur, Cekungan Bandung, Priatim-Pangandaran, Ciayumajakuning, Purwasuka, dan Sukabumi), Kawasan Andalan Cekungan Bandung memperlihatkan kondisi perkembangan yang lebih tinggi, jika dilihat dari arus pergerakan barang dan orang. Hal ini terjadi akibat ketersediaan sarana dan prasarana wilayah kawasan yang mendukung perkembangan sektor unggulan di kawasan tersebut.

Kondisi pola ruang yang dilihat dari pencapaian kebijakan kawasan lindung (KL) 45% pada tahun 2010, berdasarkan kesesuaian tutupan lahan 2005 dengan kawasan lindung yang ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Barat, menunjukkan pencapaian kawasan lindung yang sesuai sebesar 27,5% (KL dalam kawasan hutan 11,3% dan KL diluar kawasan hutan 16,2%), sedangkan yang kurang sesuai sebesar 14,8% dan yang tidak sesuai sebesar 6,6%.

Penyimpangan pemanfaatan ruang diperlihatkan dengan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) selama kurun waktu 1994-2005 terjadi penurunan luas lahan hutan sebesar 242.922,26 Ha (28,48%) dan sawah sebesar 253.281,71 Ha (27,13%).

Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan Jawa Barat. Alih fungsi lahan di Jawa Barat terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan air, perambahan daerah/kawasan hulu sungai. Dari kurun waktu 2001-2005 telah terjadi perubahan luas tutupan lahan hutan primer sebesar 3.103,3 ha, dan hutan sekunder 21.691,1 ha, sedangkan perkebunan bertambah sebesar 27.829,7 ha.

Alih fungsi lahan tersebut merupakan indikasi rentannya kondisi lahan yang menjadi penyebab degradasi lingkungan. Indikasi ini dapat dilihat pada degradasi lingkungan pada kawasan lindung seperti kawasan Bandung Utara, dan Bopunjur. Pada kurun waktu 2003-2005 terjadi penurunan luasan sawah di Jawa Barat rata-rata 0,45% per tahun. Data lain menyebutkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 2,14% menunjukkan kondisi yang sebanding dengan alih fungsi lahan hutan dan sawah seluas 0,5% per tahun. Hal tersebut antara lain terjadi karena belum berfungsinya aspek pengendalian dalam pelaksanaan penataan ruang, serta terkait dengan kewenangan perijinan pemanfaatan ruang yang sepenuhnya berada di tingkat Kabupaten/Kota dan masih sering dilaksanakan sebagai bagian dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu keterpaduan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.

Perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007, diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada Undang-undang tersebut pemerintah provinsi antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis provinsi sesuai dengan kewenangan di tingkat provinsi.

2.1.11 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Potensi sumberdaya alam yang tidak terbaharukan diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Di tingkat

nasional, Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 4% terhadap produksi minyak bumi nasional dan sekitar 11% terhadap produksi gas nasional yang dihasilkan dari 58 lapangan Migas, yang sebagian besar berada di kawasan pantai utara Jawa Barat. Sementara untuk sumberdaya terbarukan, Jawa Barat memiliki potensi panas bumi sekitar 6.101 MW atau (21,7%) dari total potensi panas bumi Indonesia. Sampai dengan tahun 2007, sekitar 92,81% energi nasional yang dihasilkan dari panas bumi dipasok oleh pembangkit panas bumi yang berada di Jawa Barat. Sementara untuk pasokan energi nasional yang bersumber dari PLTA, Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 46,21%. Sumberdaya tak terbarukan lainnya adalah sumberdaya tambang yang terdiri dari 40 jenis dan tersebar di 16 kabupaten, dan sebagian besar tersebar di Jawa Barat bagian selatan.

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa Barat. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan, serta banjir di wilayah pantai utara dan Cekungan Bandung. Dalam kurun waktu dari Januari sampai November tahun 2007, tercatat telah terjadi banjir 128 kali, tanah longsor 124 kali, angin topan 163 kali dan gempa bumi dengan kejadian 10 kali. Kesemuanya itu menyebabkan rumah rusak berat sebanyak 1.616 buah dengan korban meninggal mencapai 48 orang.

Upaya mewujudkan fungsi 45% Kawasan Lindung Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi antar instansi dan rehabilitasi lahan dan hutan serta penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Sisa lahan kritis sampai tahun 2007 mencapai 202.130,05 ha. Sementara untuk kegiatan penandaan batas telah dilaksanakan sepanjang 1.040 m selama tiga tahun dan dapat diselesaikan tahun 2007. Perwujudan 45% kawasan lindung tersebut melibatkan insitusi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung 45% dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi.

Dalam urusan lingkungan hidup, sampai dengan tahun 2007 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengendalikan tingkat pencemaran air sungai di Jawa Barat. Upaya tersebut antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik di 7 sungai utama, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program *Environmental Pollution Control Management (EPCM)*, produksi bersih, serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Sementara dari sisi penegakkan hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar. Namun demikian, apabila memperhatikan kondisi kualitas air sungai di 7 sungai utama, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan produksi bersih, serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek *shock therapy* terhadap pelaku pencemar.

Terkait dengan perkembangan kondisi air tanah di Jawa Barat, beberapa cekungan air tanah kritis secara umum memperlihatkan kondisi ketersediaan air tanah yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai implikasi dari meningkatnya pengambilan air tanah untuk keperluan industri, domestik, serta komersial. Pemanfaatan sumberdaya air tanah di Jawa Barat terus meningkat, sekitar 47,62% air tanah dimanfaatkan oleh industri dan komersil, 28,24% dimanfaatkan oleh PDAM dan hanya sekitar 1,29% dimanfaatkan oleh permukiman. Di Cekungan Bandung, hasil pengamatan dari beberapa sumur pantau air tanah dalam memperlihatkan laju penurunan 2-5 m setiap tahunnya. Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah telah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mengendalikan laju penurunan air tanah, terutama di cekungan air tanah kritis. Langkah tersebut meliputi pemantauan kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah secara ilegal, serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Ke depan, untuk memulihkan kondisi air tanah di Cekungan kritis masih diperlukan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sektor industri di dalam mengembangkan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi wilayah perlu diarahkan

pada aktivitas ekonomi yang berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah.

Dari aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah mencapai 60-70%. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber energi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.

Persoalan lingkungan lainnya yang dihadapi di Jawa Barat adalah belum tertanganinya kerusakan kawasan pesisir. Di wilayah pesisir utara Jawa Barat, kerusakan kawasan ditandai oleh kerusakan hutan bakau, abrasi pantai, serta pendangkalan muara sungai yang berdampak pada produksi perikanan. Tingkat abrasi yang terjadi di pantai selatan sekitar 35,35 ha/tahun dan di pantai utara sekitar 370,3 ha/tahun dengan indeks pencemar air laut antara 7,391-9,843 yang menunjukkan sudah tercemar berat.

Di Jawa Barat, langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan energi listrik telah diinisiasikan sejak tahun 2004 melalui penyiapan pemanfaatan sumber panas bumi dengan total potensi 9.000 MW. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, pembangkit tersebut telah terkoneksi dan memberi pasokan ke sistem jaringan Jawa-Bali.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhannya. Di Jawa Barat, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung & kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaanya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah.
4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
6. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7. Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat.

2.3. Isu Strategis Kewilayahan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu kewilayahan berdasarkan 5 (lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Wilayah Priangan Timur, dengan lingkup kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
 - a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - b. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Priangan Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;
 - c. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;
 - d. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;

- e. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - f. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
 - g. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
 - h. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular.
 - i. Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut
 - j. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;
 - k. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;
 - l. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - m. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
 - n. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - o. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
2. Wilayah Cekungan Bandung, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
- a. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;
 - b. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;
 - c. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;

- d. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam;
 - e. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
 - f. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;
 - g. Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan.
3. Wilayah Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.
- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
 - b. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam
 - d. Pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
 - e. Pengelolaan sumber daya air yang belum terpadu dan berkelanjutan;
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari swasta (masyarakat) seperti program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan provinsi;
 - h. Belum tersedianya sarana rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - i. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, serta tingginya migrasi masuk dari luar Jawa Barat;

- j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;
 - k. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - l. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;
 - m. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
4. Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.
- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
 - b. Kawasan lindung;
 - c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
 - e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;
 - f. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
 - g. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - i. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
 - j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.
5. Wilayah Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.
- a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - b. Kemiskinan penduduk pada daerah pertanian dan pesisir serta transformasi struktural dari perdesaan ke perkotaan, tradisional ke modern;

- c. Keterbatasan lapangan kerja;
- d. Ketimpangan sosial (RLS, AHH, Trafficking) dan ekonomi (daya beli);
- e. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk;
- f. Keterbatasan infrastruktur;
- g. Penetapan kawasan lindung;
- h. Pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir dan laut;
- i. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;
- j. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

2.4. Skenario dan Asumsi Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2008 - 2013 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2013.

Fokus pembangunan masyarakat berkualitas, produktif dan berdaya saing dalam kurun waktu 2008 - 2013, pada aspek kesehatan melalui strategi meliputi pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan, perluasan jangkauan puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan puskesmas dan pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.

Untuk kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, maka strateginya diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, sedangkan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kesehatan diarahkan bagi masyarakat agar sadar dalam hidup sehat dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008 dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota-kota terpilih, maka pada tahun 2008 sampai dengan 2013 ini dicanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sasaran utama lainnya pada periode ini, dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat guna mengantisipasi perkembangan globalisasi.

Sedangkan fokus pembangunan keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan pekerja, diimplementasikannya pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit.

Pengembangan agribisnis di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pansela dan Pantura; penumbuhan dan pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan captive demand; serta melakukan penumbuhan, pencegahan dan pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang.

Aspek industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Jawa Barat.

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standard internasional.

Pengembangan KUMKM diarahkan pada upaya penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar, penciptaan lapangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sistem pembiayaan bagi KUMKM melalui optimalisasi peran lembaga keuangan Bank/non Bank, optimalisasi peran dan fungsi lembaga penjaminan kredit bagi KUMKM, penyederhanaan perijinan dan fasilitasi aspek legal produk KUMKM, advokasi kelembagaan dan usaha KUMKM, peningkatan penguasaan teknologi bagi KUMKM pengembangan sentra bisnis kawasan ekonomi KUMKM melalui optimalisasi peran Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pengembangan jaringan KUMKM baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, pengembangan KUMKM di perdesaan melalui program pertumbuhan desa dengan pendekatan kooperatif, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, pendampingan KUMKM melalui peran sarjana pendamping, pengembangan kemitraan bagi KUMKM dengan badan usaha lainnya, peningkatan kualitas koperasi melalui pemeringkatan, penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dan akreditasi koperasi, fasilitasi sarana prasarana bagi KUMKM, pengarusutamaan gender KUMKM dan pengembangan KUMKM pada kelompok-kelompok strategis. Pada tahap ini, KUMKM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam struktur perekonomian baik regional maupun nasional serta dapat menciptakan lapangan usaha dan penerapan tenaga kerja.

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana banjir dan kekeringan, meningkatnya layanan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan energi terbarukan, meningkatnya cakupan pelayanan

telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan serta meningkatnya ketersediaan rumah susun di perkotaan.

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dan terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Dalam penyediaan kebutuhan energi maka potensi energi alternatif akan terus dikembangkan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana alam yang pada akhirnya akan terbangunnya pola pendayagunaan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan mengarahkan persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi.

Pembangunan aspek politik diarahkan pada upaya membangun konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam berpemerintahan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.

Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan dan pembentukan hukum daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya.

Pembangunan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja aparatur dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur termasuk di dalamnya pengembangan jabatan fungsional. Untuk meningkatkan pelayanan publik akan diterapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional.

Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil.

Kesenjangan antardaerah di Jawa Barat semakin berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Jawa Barat. Kondisi ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sesuai dengan skala pelayanannya serta tidak ada lagi desa tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada.

Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan dilaksanakannya RTRWP Jawa Barat dan ditindaklanjutinya RTRWP ke dalam rencana tata ruang yang lebih rinci serta terjalinnya koordinasi dalam konteks pembinaan dan pengawasan tata ruang antara provinsi dengan dengan kabupaten/kota.